

KABARPKS

Kabarkan Kiprah PKS untuk Indonesia



PKS

*Bersama Melayani
Rakyat*



Presiden PKS:

**Politik PKS Adalah
Politik Silaturahmi**



Netty Prasetiyani:

**Kantor PKS Siap
Jadi Tempat
Pemberian Vaksin**

JALIN SILATURAHIM, RAJUT BAJU KEBANGSAAN



Jalin Silaturahmi, Rajut Baju Kebangsaan

Sebuah agenda strategis dihelat DPP PKS. Namanya Silaturahmi Kebangsaan. Dimulai dari pekan pertama Ramadhan dan berlangsung hingga hari ini. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikh. Semua partai telah disambangi. Ada juga ormas keagamaan.

Diawali oleh PPP yang mengunjungi Pimpinan PKS di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta. Berlanjut mendatangi Partai Demokrat (PD), kemudian PDI-Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra. Di sela-sela itu, PKS juga silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII). Terkini, Pimpinan PKS bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Pengurus Pusat Muhammadiyah dan lainnya.

Silaturahmi Kebangsaan ini memiliki tujuan utama untuk memperkenalkan kepengurusan baru DPP PKS periode 2020-2025, lambang baru PKS yang mengalami rejuvenasi, Mars dan Hymne

PKS yang berubah. Selain itu juga untuk mendiskusikan berbagai persoalan bangsa.

Seperti disebutkan di atas, Silaturahmi Kebangsaan ini jadi agenda strategis. Mengapa?

Pertama, pendewasaan politik. Sistem politik kita sesungguhnya tidak mengenal istilah oposisi. Ini akibat "jenis kelamin" yang tidak jelas. Presidential dan Parlemen (multi partai) secara bersamaan diterapkan. Sejauh ini, PKS merupakan partai yang berada di luar pemerintah. Dianggap sebagai oposisi, sebuah istilah yang "terpaksa" kita pakai, karena belum menemukan padanan yang tepat jika bercermin dari sistem politik kita.

Melalui Silaturahmi Kebangsaan, PKS tampaknya ingin memberi pesan penting pada publik. Bahwa pilihan oposisi bukan berarti memutus relasi. Dalam menyikapi isu politik boleh berseberangan, tapi tidak boleh hubungan antar partai jadi terputus. Sikap semacam ini pernah ditunjukkan oleh politisi handal

dahulu kala. Natsir, Soekarno dan lainnya. Mereka berdebat di parlemen, tapi tetap bisa asyik ngopi di tempat lain.

Jadi, PKS tampaknya ingin membuat semua pihak lebih dewasa dalam berpolitik. Sesuatu yang semakin sulit diwujudkan saat ini. Asbabnya ialah pihak-pihak tertentu yang terus memprovokasi dan mengadu domba antar kelompok dan antar agama.

Kedua, kesadaran sejarah. Maksudnya adalah, Indonesia sebuah bangsa dan negara besar. Bahkan teramat besar. Tak mungkin negeri yang memiliki 17.504 pulau dan gugusan pantai kedua terpanjang di dunia ini, dapat berkembang dan maju hanya oleh satu atau dua kelompok. Silaturahmi Kebangsaan sepertinya ingin menegaskan itu.

Pada titik ini, saya melihat ada kesadaran sejarah yang dimiliki PKS. Negeri ini dalam episode sejarahnya memang tak dapat dilepaskan dari kontribusi berbagai elemen bangsa. Ada santri, ulama, anak-anak muda,

mahasiswa, petani, nelayan, guru, buruh dan seterusnya. Ada orang Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua hingga Bali. Juga agama lain yang memberikan sumbangsinya masing-masing dalam memperjuangkan dan mengisgi kemerdekaan.

Kesadaran Sejarah semacam ini sangat penting di tengah situasi sosial politik hari ini. Yakni ketika klaim-klaim hanya kelompok mereka yang berjasa dan menegasikan golongan lainnya. Menganggap kelompoknya paling Pancasila dan NKRI, dan lainnya tidak.

Ketiga, Ikhtiar mendapatkan kanal aspirasi yang tepat. Jika kita cermati, muatan Silaturahmi Kebangsaan yang dilakukan PKS ini menarik. Persoalan yang dibawa ke setiap partai dan ormas berbeda.

Dengan PPP, Pimpinan PKS bicara tentang pentingnya persatuan atau ukhuwah Islamiyyah. Dengan PD, mereka menyinggung soal pentingnya regenerasi kepemimpinan

pada 2024. Dengan Golkar, isu yang diangkat tentang kondisi ekonomi dan gerakan THR ke Desa. Terakhir dengan Gerindra, PKS minta dukungan untuk bersama-sama memperjuangkan RUU Perlindungan Tokoh Agama.

PKS tampaknya ingin agar Silaturahmi Kebangsaan ini betul-betul bermanfaat optimal bagi khalayak. Karena itu, persoalan yang dibahas harus betul-betul tepat. Melihat siapa yang menjadi kawan berkomunikasi. Dan semua permasalahan tersebut di atas, merupakan isu yang menjadi perbincangan di masyarakat. Tak berlebihan jika kita menafsirkan bahwa PKS melalui Silaturahmi Kebangsaan ini, berharap dapat menyuarakan aspirasi yang berkembang kepada pihak yang tepat.

Secara umum, Silaturahmi Kebangsaan ini adalah langkah PKS untuk merajut baju kebangsaan yang terkoyak-koyak. PKS tak ingin bangsa dan negara ini tercerai-berai. Karena NKRI sudah harga mati!



Silaturahmi

Temui Sri Sultan HB X, Presiden PKS Dapat Pesan Jaga NKRI

“Kami mendapat nasihat dan arahan dari Ngarso Dalem bagaimana kita menjaga komitmen menjaga keutuhan NKRI. Kami sangat bersyukur dapat menerima nasihat, wejangan, dan dukungan secara langsung dari Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X. Semoga semakin mengukuhkan semangat PKS dalam berkhidmat melayani dan membela NKRI,”

H. Ahmad Syaikhu
Presiden PKS

Silaturahmi

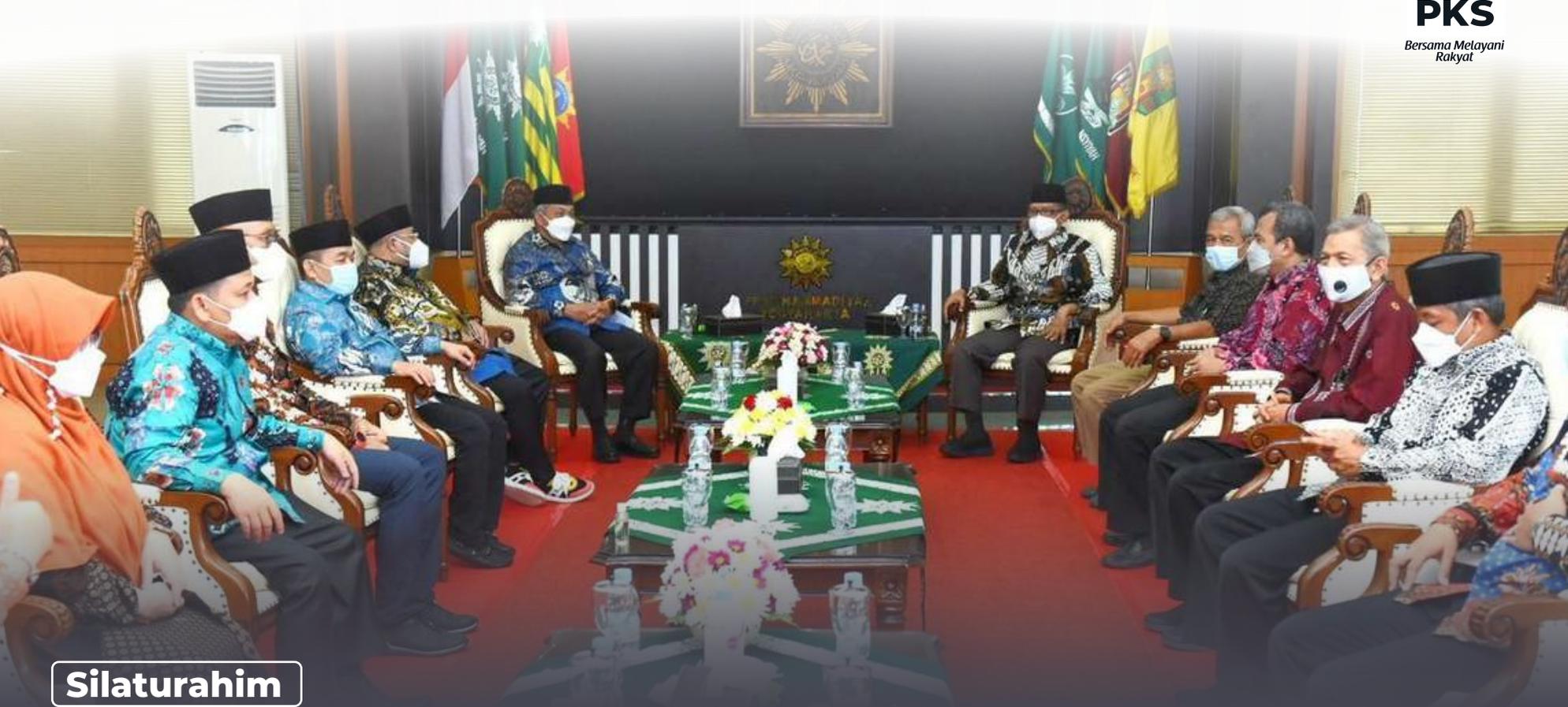
Silaturahmi Kebangsaan ke Keraton Yogyakarta, Presiden PKS Sebut Sri Sultan HB X Simbol Persatuan

“Kami sangat berbahagia sekali dapat bertemu Ngarso Dalem Sri Sultan HB X, sebab beliau seorang tokoh nasional yang terus menyuarakan persatuan bangsa, menjadi perekat dan simbol kekuatan sosial politik dan budaya bangsa, serta konsisten dalam menyuarakan amanat penderitaan rakyat. Semoga Ngarso Dalem senantiasa diberi kesehatan sehingga terus bisa menjadi panutan dalam kebaikan. Dalam tulisan Parni Hadi, beliau disebut Inspiring Prophetic Leader, memimpin dengan Kecerdasan Intelektual dan Spiritual. Teman-teman PKS yang tadi bertemu merasakan dari sentuhan kuat beliau bukan hanya kecerdasan semata tapi juga spiritual menjiwai betul. Kami bersyukur bisa mendapat nasihat dari beliau,”

H. Ahmad Syaikhu

Presiden PKS





Silaturahmi

Bertandang ke PP Muhammadiyah, Presiden PKS Promosikan Silaturahmi Kebangsaan Lawan Keterbelahan Publik

“Dalam pertemuan hari ini, selain kami ingin takdzim dan silaturahmi kepada para guru kami, kami juga ingin memperkenalkan kepengurusan baru DPP PKS masa bakti 2020-2025. DPP PKS melakukan silaturahmi kebangsaan dengan berbagai pihak, untuk membangun titik temu dan kesamaan pandangan dalam melihat arah masa depan bangsa agar bisa lebih bersatu, kokoh dan kuat,”

H. Ahmad Syaikhu
Presiden PKS

Silaturahmi

Syaikhu: PKS-Muhammadiyah Miliki Pandangan Sama Perkuat KPK dan Gerakan Anti Korupsi



Yogyakarta -- Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengapresiasi sikap konsisten dan tegas PP Muhammadiyah dalam merespons berbagai isu-isu strategis nasional seperti isu pemberantasan korupsi, perlindungan HAM, demokrasi, Palestina dan keadilan ekonomi.

Syaikhu bahkan menyebut PKS dan Muhammadiyah memiliki kesamaan pandangan pada beberapa isu nasional. Dalam isu anti-korupsi misalnya. Syaikhu menyebut sikap PKS dan Muhammadiyah memiliki satu kesamaan bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak

boleh dilemahkan.

"Kami memandang bahwa Tes Wawasan Kebangsaan juga sebuah kebijakan yang tidak tepat, karena membenturkan nasionalisme dengan hak beragama warga. Selain itu, Tes Wawasan Kebangsaan dalam penyelenggaraannya tampak terlihat ada upaya untuk semakin melemahkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Syaikhu usai pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan jajaran PP Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Selasa (8/6/2021).

Dalam isu perlindungan HAM dan demokrasi, PKS-Muhammadiyah juga memiliki banyak kesamaan pandangan. Syaikhu berpendapat perlindungan HAM dan kualitas demokrasi di Indonesia semakin menurun.

"Dalam isu Palestina, kami sangat hormat dan bangga atas sikap Muhammadiyah yang tidak hanya konsisten dalam sikap politik tetapi juga bergerak nyata dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan menggalang bantuan dana hingga mencapai sekitar 30 M lebih. Luar biasa! Semoga Allah SWT semakin memberikan keberkahan buat Muhammadiyah," kata dia.

Dalam isu ekonomi, PKS-Muhammadiyah juga banyak titik temu pandangan. Pandangan ekonomi PKS didasarkan kepada ekonomi konstitusi. Dimana keadilan dan kedaulatan ekonomi harus menjadi pedoman dan pijakan. Oleh karena itu, PKS konsisten menolak upaya liberalisasi

ekonomi melalui UU Cipta Kerja.

"Kami menuntut keadilan ekonomi bagi para pekerja dan buruh yang dimarginalkan demi kepentingan investasi. Harus ada titik keseimbangan antara kepentingan pemodal atau investor dengan kepentingan pekerja dan buruh serta perlindungan lingkungan hidup," ungkap dia.

Sikap Muhammadiyah yang tegas dalam penolakan RUU HIP, Penolakan PP soal Investasi Miras, Penghilangan Frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional, Hilangnya kewajiban pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia, iman takwa dan akhlak mulia dalam PP Sistem Pendidikan Nasional, sangat membantu PKS dalam perjuangan di parlemen.

Secara khusus, PP Muhammadiyah meminta kepada PKS agar setiap draf RUU yang bergulir di parlemen naskah akademik bisa disampaikan ke PP

Muhammadiyah guna memberikan kajian dan masukan.

"Saya kira ini positif, Muhammadiyah memiliki 170 perguruan tinggi sehingga bisa membantu memberikan kajian yang lebih mendalam terhadap sebuah RUU," kata dia.

"PKS siap menyampaikan aspirasi Muhammadiyah untuk diperjuangkan dalam proses politik di parlemen. Mohon doa dan dukungannya, saat ini kami sedang memperjuangkan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama agar tidak ada lagi ketidakadilan hukum dan diskriminasi terhadap Ulama, Kiyai, maupun Cendekiawan Muslim, serta penodaan terhadap simbol-simbol agama. Juga, kami sedang memperjuangkan RUU Larangan Minuman Beralkohol sebagai komitmen kita dalam menegakkan nahi munkar dan demi masa depan generasi bangsa ke depan," kata dia.

Kunjungan

Audiensi dengan KPPI, Syaikhu: PKS Komitmen Tingkatkan Partisipasi Perempuan di Legislatif

"Dalam hal kebijakan anggaran untuk program peningkatan kapasitas perempuan, PKS memberikan porsi yang besar kepada BPKK sebagai ujung tombak pemberdayaan perempuan dalam hal pendidikan politik dan kaderisasi. PKS akan terus berupaya melakukan rekrutmen terbuka. Ada kesadaran bahwa perempuan memiliki hak untuk terlibat politik, turut berkontribusi secara langsung membangun bangsa melalui jalur politik. Alhamdulillah saat ini ada 8 Srikandi PKS di DPR RI. Harapannya PKS dan KPPI bisa bersama memastikan kualitas terbaik bagi caleg-caleg perempuan pada Pemilu 2024 mendatang. Lebih luas dari itu, sinergi dalam mengokohkan keterlibatan perempuan dalam membangun Indonesia yang adil dan sejahtera,"

H. Ahmad Syaikhu
Presiden PKS

Kunjungan

Ketua KPPI Berharap PKS Tetap Perjuangkan Revisi UU Pemilu

"Kami berterimakasih bahwa PKS adalah salah satu yang mendorong untuk dilakukannya revisi UU Pemilu. PKS ini adalah salah satu partai yang tidak memiliki sayap perempuan. Tapi kami tahu bahwa Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS memiliki jaringan yang disebut baik hingga tingkat desa dan kelurahan. Kami mengharapkan adanya perhatian yang lebih besar lagi supaya proses rekrutmen dan kaderisasi ini membuat perempuan-perempuan di tiap level tidak menjadi persoalan, walaupun kami tahu PKS sudah memiliki pola kaderisasi yang baik di tingkat kader-kadernya,"

Dwi Septiawati Djafar

Ketua DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)

Jakarta -- Ketua DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia

(KPPI) Dwi Septiawati Djafar menyampaikan harapannya



Ketua DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati Djafar saat audiensi ke kantor DPP PKS, Rabu (02/06/2021). (Hilal/PKSFoto)

kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperjuangkan revisi Undang Undang Pemilu.

"Kami berterimakasih bahwa PKS adalah salah satu yang mendorong untuk dilakukannya revisi UU Pemilu. Kami berharap pada 2022 bisa diajukan kembali dengan klausul revisi terbatas," ucap Dwi saat melakukan audiensi ke kantor DPP PKS, Rabu (02/06/2021).

Dwi menekankan agar PKS tetap melanjutkan perannya dalam mendorong terjadinya

revisi pada UU Pemilu.

"Setidaknya ini dilakukan secara terbatas dengan UU Pemilu terkait penguatan kebijakan afirmasi. Karena begitu ditutup revisi UU Pemilu, maka upaya untuk penguatan kebijakan afirmasi secara regulasi juga menjadi tertutup. Saya pikir ini masih bisa dilakukan," tutur Dwi.

Dalam kesempatan tersebut, Dwi juga mengapresiasi adanya perhatian PKS dalam hal rekrutmen dan kaderisasi kepada caleg-caleg perempuan.

"PKS ini adalah salah satu partai yang tidak memiliki sayap perempuan. Tapi kami tahu bahwa Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS memiliki jaringan yang disebut baik hingga tingkat desa dan kelurahan. Kami mengharapkan adanya perhatian yang lebih besar lagi supaya proses rekrutmen dan kaderisasi ini membuat perempuan-perempuan di tiap level tidak menjadi persoalan, walaupun kami tahu PKS sudah memiliki pola kaderisasi yang baik di tingkat kader-kadernya," pesan Dwi.

Kunjungan

Terima Kunjungan Dirjen Polpum Kemdagri, PKS Diskusi Bangun Sistem Kepartaian

“Aada dialog-dialog produktif yang bagus, dan kami ada banyak pencerahan dari pak Presiden PKS bagaimana membangun sistem kepartaian yang lebih baik hari ini dan kedepan,”

Bahtiar

Kepala Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri



Jakarta-- Partai Keadilan Sejahtera menerima kehadiran jajaran Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka serah terima bantuan keuangan partai politik dan

diskusi terkait sistem kepartaian di Indonesia, Kamis (3/6/2021).

Jajaran Dirjen Polpum dipimpin oleh Kepala Dirjen, Bahtiar, menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan pengurus

DPP PKS menerima kunjungannya, ia juga menjelaskan tujuan dari Polpum Kemdagri mendatangi kantor DPTP PKS

Kami hari ini datang bersama teman-teman Kemdagri

mewakili Menteri Dalam negeri sekaligus melakukan penandatanganan berita acara penyerahan bantuan keuangan bantuan politik tahun 2021,” ujar Bahtiar.

Diterima langsung oleh Bapak Presiden PKS, Bendahara Umum dan Pengurus DPP, kami merasa terhormat, dan sangat tersanjung beliau berkenan hadir langsung,” lanjutnya.

Bahtiar menuturkan selain penyerahan bantuan politik, juga ada diskusi dengan pengurus DPP PKS dalam membangun sitem kepartaian di Indonesia, ia mengatakan mendapat pencerahan dan masukan yang produktif sai berdiskusi dengan pengurus DPP PKS.

“Tentu ada dialog-dialog produktif yang bagus, dan kami ada banyak pencerahan dari pak Presiden PKS bagaimana membangun sistem kepartaian yang lebih baik hari ini dan kedepan,” tutur Bahtiar.

“Salah satunya yang kami dorong bagaimana Negara memiliki proteksi yang cukup untuk membangun dan memperkuat sistem kepartaian di Indonesia kedepan, karena itu tujuan reformasi, kata dia.

Sementara Presiden PKS Ahmad Syaikh, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Dirjen Polpum Kemdagri, ia juga menegaskan bantuan politik partai politik akan dipergunakan untuk edukasi politik dan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel.

“ini menjadi satu momentum menjadi bahan diskusi kita, bagaimana memperbaiki sistem politik kedepan, dan tentu saja kami sangat terima kasih, in sya Allah dana untuk bantuan partai politik ini kami manfaatkan untuk proses edukasi politik bagi konstituen kami, dan tentu akan kami pertanggung jawabkan secara tranparan dan akuntabel,” pungkas Syaikh.

**Silaturahmi**

Sambut Kunjungan Lieus Sungkharisma, Presiden PKS: Perkuat Gerakan Oposisi untuk Kontrol Kekuasaan

“Ini adalah wujud komitmen kita menjaga demokrasi agar tetap sehat, memastikan check and balances tetap berjalan. Saat ini kita lihat Indonesia dilanda berbagai krisis, mulai dari krisis kepemimpinan nasional, ekonomi, dan lainnya sehingga perlu ada koreksi dalam mengelola negara. Saya yakin Pak Lieus punya niat baik ingin memperbaiki bangsa, pun dengan PKS. Semoga dari pertemuan hari ini bisa terjalin sinergi bersama,”

H. Ahmad Syaikhu
Presiden PKS

Silaturahmi

Lieus Sungkharisma: Banyak Kader Intelektual di PKS

"Saya berharap PKS bisa menyuarakan kebenaran sehingga yang benar memang benar dan yang salah nampak salah. Tidak seperti sekarang ini, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan sehingga nampak salah"

Anton Aprianto,
Redaktur Eksekutif Tempo

Jakarta -- Aktivis Sosial Kemasyarakatan Lieus Sungkharisma menyampaikan masih ada orang yang mampu melihat permasalahan bangsa dengan sikap adil, seperti kader intelektual di PKS.

"Saya percaya di Indonesia masih banyak orang baik yang mampu melihat permasalahan bangsa ini dengan sikap yang adil. Salah satunya di PKS yang banyak kader intelektual lulusan luar negeri dan dalam negeri yang pintar-pintar," tutur Lieus, Jumat (18/06/2021).

Lieus mengungkapkan keresahannya akan matinya suara dari para intelektual yang

kalah dengan suara buzzer.

"Fenomena matinya suara intelektualitas ini mengkhawatirkan. Entah karena takut diserang para buzzer atau dikebiri oleh penguasa atau entah karena sudah pasrah. Kondisi seperti sekarang ini tidak sehat untuk sebuah negara demokrasi," jelas Lieus.

Lieus menyayangkan suara intelektual yang tertutup oleh suara buzzer sehingga terlihat salah dan bodoh.

"Saking masifnya dengungan buzzer, seolah-olah nampak benar dan menutupi kebenaran itu sendiri. Lalu



Kunjungan Lieus Sungkharisma ke Kantor DPP PKS, Jumat (18/06/2021). (Hilal/PKSFoto)

pendapat intelektual akan nampak salah dan bodoh. Para intelektual yang bersuara akan dibantai habis sampai tak berkutik oleh para buzzer," ucap Lieus.

Dia mengatakan fenomena redupnya demokrasi tersebut membuatnya ingin belajar dan berbagi kecemasan dengan PKS.

"Saya berharap PKS bisa menyuarakan kebenaran sehingga yang benar memang benar dan yang salah nampak salah. Tidak seperti sekarang ini, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan sehingga nampak salah," ujar dia.

Lieus berharap bersama PKS akan muncul para pembela

kebenaran di pelosok negeri yang mampu membungkan suara buzzer.

"Saya yakin PKS bersama partai lain bisa menjadi pembawa suara kebenaran walau sekecil apapun. Semoga matinya suara para intelektual ini segera berakhir," harap Lieus.

Covid-19

Kasus Covid-19 Melonjak Lagi, Netty Minta Pemerintah Waspada dan Gerak Cepat

"Lonjakan kasus ini harus jadi alarm bagi pemerintah untuk waspada dan segera bergerak cepat melakukan langkah antisipasi dengan meningkatkan testing. Jangan sampai kita baru gelagapan setelah semakin banyak daerah zona merah. Ancaman Covid-19 ini nyata dan semakin masif. Varian baru telah dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Pemerintah perlu memikirkan kemungkinan memberlakukan lockdown total guna mengendalikan lonjakan kasus. Pemerintah tidak boleh lengah dan lelah dalam memantau penegakan prokes. Sosialisasi dan edukasi masif kepada masyarakat harus terus dilakukan,"

Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si
Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial DPP PKS

Covid-19

Hari Bidan Nasional, PKS : Bidan Pahlawan bagi Ibu dan Anak Indonesia



Jakarta -- Pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih dari setahun di Indonesia tak lepas dari perjuangan tenaga kesehatan (nakes) yang bahu membahu melayani kesehatan pasien Covid-19. Bahkan, dalam perjuangan melayani pasien Covid-19 banyak nakes yang terpapar Covid-19 di tempat kerja, baik di rumah sakit (RS), klinik maupun puskesmas. Seakan-akan area kerja para nakes itu menjadi

lokasi yang menyeramkan. Nakes yang berada di garda terdepan di pandemi Covid-19 termasuk para bidan Indonesia.

Setiap tanggal 24 Juni Indonesia memperingati Hari Bidan Nasional. Dalam berjuang di masa pandemi Covid-19 tak bisa kita lupakan jasa dan pengorbanan bidan Indonesia. Di masa pandemi ini, banyak perempuan terutama ibu hamil dan ibu dengan

balita yang lebih memilih untuk mendatangi bidan untuk memeriksa kandungannya atau balitanya. Demikian juga dengan perempuan yang akan memasang alat kontrasepsi akhirnya memilih mendatangi bidan dibanding mendatangi faskes.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati memuji perjuangan bidan di Indonesia.

Menurutnya, bidan adalah pahlawan di tengah pandemi Covid-19 yang membantu persalinan ataupun pemeriksaan kehamilan. Bahkan, di kampung-kampung masih banyak orang yang berobat ke bidan dikarenakan faskes yang jauh dan tenaga dokter yang masih terbatas.

“Semakin banyaknya orang yang mendatangi bidan untuk pemeriksaan kehamilan, persalinan atau berobat membuat bidan juga berisiko terpapar Covid-19. Karena itu bidan harus mendapat perhatian untuk dilindungi karena potensi tertular Covid juga tinggi mengingat banyaknya OTG,” kata Mufida, Jumat (25/6/2021).

Selama ini, terangnya, perhatian untuk penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi nakes lebih banyak diprioritaskan bagi dokter dan perawat. Sementara APD untuk bidan sering terlupakan. Data dari Ikatan Dokter Indonesia juga menyebutkan bahwa setelah satu tahun pandemi

terdapat 106 bidan meninggal dunia dari 718 nakes yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

Di momentum Hari Bidan Nasional, Mufida mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap bidan dalam bertugas dengan menyediakan APD yang standar. Dia menilai bidan penting dalam melayani persalinan.

“Harusnya bidan dicukupkan APD-nya dan semua kebutuhannya dalam bertugas. Juga kesehatannya harus dijaga dan dilindungi. Bidan berperan penting dalam melayani persalinan,” imbuhnya.

“Lindungi bidan. Mereka adalah pahlawan yang terlupakan di masa pandemi Covid-19 ini,” tegas Anggota DPR RI Dapil Jakarta 2 yakni Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini. Mereka adalah Pahlawan bagi ibu dan anak Indonesia.”

Covid-19

Percepatan Vaksinasi Mendesak, Ketua DPP PKS: Kantor PKS Siap Jadi Tempat Pemberian Vaksin

"Percepatan vaksinasi ini sangat mendesak, karena masih banyak pihak dan sektor-sektor penting lainnya yang belum terjangkau vaksinasi. Jika diperlukan, kantor-kantor PKS, baik tingkat provinsi atau pun kota kabupaten di seluruh Indonesia siap menjadi tempat pemberian vaksin kepada masyarakat,"

Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial DPP PKS

Jakarta – Pemerintah menargetkan vaksinasi sebanyak 2 juta dosis per hari. Sabtu (26/06/2021), vaksinasi Covid-19 baru mencapai 1,3 juta dosis. Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar lebih gregat dan kreatif dalam mengejar target tersebut.

"Target 2 juta dosis per hari harus segera terealisasi agar kekebalan kelompok bisa cepat terwujud. Pemerintah perlu menemukan cara-cara kreatif untuk mengakselerasi program

vaksinasi sebagai game changer yang diharapkan dapat mengendalikannya pandemi," kata Netty, Senin (29/06/2021).

Kendala program vaksinasi, termasuk kurangnya tempat, kata Netty, harus segera diselesaikan. Politisi perempuan PKS ini menyebut kantor PKS siap jadi tempat pemberian vaksin kepada masyarakat.

"Percepatan vaksinasi ini sangat mendesak, karena masih banyak pihak dan



sektor-sektor penting lainnya yang belum terjangkau vaksinasi. Misalnya, calon PMI, guru dan tenaga pendidik serta ibu rumah tangga masih banyak yang belum divaksin. Pemerintah dapat bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk dengan partai politik untuk merealisasikan target. Jika diperlukan, kantor-kantor PKS, baik tingkat provinsi atau pun kota kabupaten di seluruh

Indonesia siap menjadi tempat pemberian vaksin kepada masyarakat," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengatakan, pemerintah harus siap berkolaborasi optimal dengan semua elemen bangsa dalam melawan pandemi.

"Dalam situasi sulit yang dikedepankan adalah prinsip saling membantu dan saling

mengingat, bukan lagi soal oposisi atau koalisi. Kita menggagalkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menanggung dampak bencana kesehatan ini. Masyarakat pun harus diedukasi agar saling menjaga, saling mengingatkan dan bergotong royong dalam mengatasi masalah pandemi, terutama terkait disiplin protokol kesehatan," ucap dia.

DPTP

HNW Ingatkan Lagi Jokowi Lobi Raja agar Tetap Ada Pemberangkatan 2021

“Ini penting dan bisa dilakukan Presiden Jokowi untuk membuktikan keseriusan Pemerintah membela hak calon haji yang juga Rakyat Indonesia itu. Hal tersebut juga perlu dan mungkin dilakukan karena Presiden Jokowi memiliki kedekatan dengan Raja Salman, bahkan pernah datang langsung ke Arab Saudi pada April 2019 dalam rangka membahas peningkatan kerja sama di bidang ekonomi. Padahal kalau loby seperti ini dilakukan dengan baik oleh Presiden Jokowi, apapun hasilnya, tentu bisa membuat umat muslim Indonesia lebih memahami bahwa pemerintah Indonesia hingga Presidennya betul-betul serius hingga level tertinggi, memperjuangkan hak calon jemaah haji dan aspirasi umat Islam di negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia,”

Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS



DPTP

Pada Launching PKS Muda Bangun Desa, Ahmad Syaikhul Beri Tiga Pesan Kepada Para Pemuda

Jakarta-- PKS menggelar acara Launching PKS Muda Bangun Desa dan Sekolah Tani Ternak Muda PKS, pada Sabtu (5/6/2021) acara yang diinisiasi oleh Bidang Kepemudaan DPP PKS, Bidang Tani Nelayan DPP PKS, dan Bidang Pembangunan Pemberdayaan Desa DPP PKS digelar secara virtual melalui media zoom dan sosial media PKS.

Presiden PKS Ahmad Syaikhul berkesempatan hadir menjadi keynote speech, dalam pernyataannya Ahmad Syaikhul mengapresiasi atas terselenggaranya launching PKS Muda Bangun Desa.

"Saya apresiasi yang telah dilakukan oleh beberapa bidang, bidang kepemudaan, bidang tani dan nelayan serta bidang pemberdayaan dan pengembangan desa yang telah berkolaborasi dalam program PKS Muda Bangun Desa," kata Syaikhul. Ahmad Syaikhul kemudian

menuturkan, potensi desa yang jumlahnya banyak di Indonesia, dapat menggerakkan roda perekonomian terutama dalam mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

"Desa mempunyai potensi yang demikian besar jumlahnya juga sedemikian banyak, menurut BPS tahun 2018 ada 83 ribu lebih daerah administrasi setingkat desa, tentu pembangunan desa ini sangat penting mengurangi kesenjangan pembangunan pedesaan dan perkotaan," tutur Syaikhul.

"Tentu pembangunan pedesaan ini harus dimulai dengan pembangunan perekonomian, lalu membangun sarana dan prasarana kesehatan aspek transportasi dan komunikasi, dan tentu pembangunan kebudayaan," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu Presiden PKS Ahmad Syaikhul juga

memberikan pesan kepada para pemuda agar mengambil peran kepemimpinan, membangun Indonesia dari desa, dan menjadi pemuda yang kreatif serta inovatif.

"Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan beberapa hal kepada para pemuda, pertama ambil lah peran kepemimpinan, kesuksesan akan menghampiri mereka yang berani mengambil peran kepemimpinan, menjadi pemain utama perubahan, bukan menjadi pemonton atau komentator," tegas Syaikhul.

"Yang kedua bangun Indonesia dari desa, saya teringat pesan Bung Hatta, bahwa Indonesia tidak akan berjaya hanya dengan nyala obor di Jakarta, tapi Indonesia akan berjaya dengan nyala lilin di desa-desa,"

"Ketiga, kreatif dan inovatif,



H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

LAUNCHING PKSMUDA BANGUN DESA DAN SEKOLAH TANI TERNAK

www.pks.id [f Partai Keadilan Sejahtera](#) [@PKSejahtera](#) [pk_sej](#)

keaktifitas dan inovasi menjadi keharusan bagi mereka yang ingin bertahan di era destruktif ini" lanjutnya.

Ahmad Syaikhul juga berharap dengan dilaunchingnya PKS Muda Bangun Desa dapat menggerakkan sector perekonomian terutama di bidang pertanian, dan dapat membuat masyarakat desa bisa

lebih berdaya.

"Saya berharap melalui program PKS Muda Bangun Desa ini dapat membantu peserta membangun pilot project kegiatan ekoomi di sektor pertanian, peternakan dan perikanan, sehingga masyarakat di desa dapat lebih berdaya," pungkasnya.

DPTP

Surahman Minta Pemerintah Transparan dalam Pembatalan Haji 2021



JAKARTA -- Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKS KH Surahman Hidayat, sangat menyayangkan pembatalan haji yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama.

Kekecewaan Surahman diungkapkan dengan ucapan "Inna nna lillahi wainna ilaihi raji'un".

Selanjutnya, Surahman

meminta kepada pemerintah untuk memberi penjelasan kepada masyarakat secara menyeluruh agar tidak memberi ruang dugaan-dugaan (zhunun) yang liar, seperti adanya dugaan bahwa dana haji digunakan untuk mendanai infrastruktur.

Di samping itu, Surahman meminta pemerintah Indonesia untuk memperbaiki dan

meningkatkan komunikasi dengan Pemerintahan Saudi Arabia secara serius.

Diplomasi pemerintah Indonesia, imbuhnya, masih sangat lemah dalam meyakinkan pemerintah Saudi bahwa jamaah haji Indonesia telah benar-benar secara ketat menjalankan protokol kesehatan dari mulai menjalani tes swab, karantina dan

"Inna lillahi wainna ilaihi raji'un.

Sungguh disayangkan, Indonesia yang merupakan negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia, namun jamaah haji dan umrah kita tidak cukup punya posisi tawar. Semoga hal ini menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak untuk mengambil langkah-langkah perbaikan agar kejadian ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang"

KH Surahman Hidayat

Ketua Dewan Syariah Pusat PKS

vaksinasi.

"Sungguh disayangkan, Indonesia yang merupakan negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia, namun jamaah haji dan umrah kita tidak cukup punya posisi tawar." ungkap Ketua Dewan Syariah Pusat PKS ini.

"Semoga hal ini menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak untuk mengambil langkah-langkah perbaikan

agar kejadian ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang." pungkasnya

Pada tanggal 3 Juni 2021 pemerintah Indonesia secara resmi membatalkan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2021 melalui KMA no.660 tahun 2021 karena hingga saat ini Pemerintah Saudi Arabia belum juga mengeluarkan kuota haji yang seharusnya dikeluarkan paling lambat tanggal 25 Mei 2021.

**PKS**Bersama Melayani
Rakyat**DPTP**

Presiden PKS: Politik PKS adalah Politik Silaturahmi

“Banyak permasalahan rumit terlihat akarnya secara jelas, dapat dipecahkan saat bertemu, di atas meja makan. Jadi perbanyak silaturahmi. Yang terpenting bangun komunikasi, jalin silaturahmi, insya Allah kemudahan-kemudahan akan diberikan. Itulah makanya saya mencanangkan bahwa politik PKS ke depan adalah politik silaturahmi,”

H. Ahmad Syaikh

Presiden PKS

DPTP

Temui Pengurus PKS se-DIY, Syaikhu: Kita Optimistis di 2024, Tapi Jangan Lengah

"Hasil berbagai lembaga survey terkait elektabilitas PKS. Banyak lembaga survei yang memiliki kredibilitas menempatkan posisi PKS pada 3-4 besar. Secara persentase, suara PKS di kisaran 6-9 persen. Pesan saya, kita boleh menggelembungkan balon optimisme. Namun jangan sampai terlalu besar. Sebab dapat pecah dan membuyarkan optimisme kita. Karena itu, agar tak terjadi, kita harus tetap rendah hati, jangan lengah, terus berikan pelayanan dan pembelaan terbaik bagi rakyat, terus memantaskan diri dan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Saya yakin, perolehan suara di Yogyakarta akan meningkat. Dan kursi kita di Kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat akan pula meningkat pesat,"

H. Ahmad Syaikhu
Presiden PKS

DPTP

Berkunjung Ke Masjid Jogokariyan, Ahmad Syaikhu Diskusi Bahas Isu Keumatan



Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat berkunjung ke Masjid Jogokariyan

Yogyakarta-- Usai menjalani Silaturahmi Kebangsaan ke kediaman Sri Sultan Hamengkubuwono X dan kantor PP Muhammadiyah, Presiden PKS Ahmad Syaikhu beserta rombongan berkesempatan mengunjungi Masjid Jogokariyan, rombongan diterima langsung oleh Ketua Dewan Syuro Masjid

Jogokariyan, Muhammad Jazir dan da'i kondang Salim A Fillah, pada Selasa (8/6/2021).

Pada kunjungannya, Ahmad Syaikhu mengatakan, sosok Muhammad Jazir dan Salim A Fillah telah berhasil mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat perdaban dan memberi warna tersendiri

dalam isu keumatan.

"Ini adalah pertemuan penuh kesan dan bersejarah karena Ustaz Jazir dan Ustaz Salim A Fillah sudah memberi warna yang khas pada isu keumatan," kata Syaikhu.

"Di bawah bimbingan Ustadz Jazir dan Ustadz Salim, Masjid

dikembalikan pada fitrahnya, sebagai pusat membangun peradaban," lanjutnya.

Syaikhu juga menuturkan, kondisi umat Islam di Indonesia yang kini menghadapi proxy yang menyudutkan, termasuk dengan menggunakan Pancasila sebagai alat kekuasaan dan isu radikalisme dan terorisme.

"Saat ini kita umat Islam menghadapi banyak serangan "proxi" yang menyudutkan Umat Islam, termasuk yang menggunakan Pancasila sebagai alat kekuasaan untuk menyerang musuh atau lawan politik, termasuk dengan isu terorisme, radikalisme," tutur Syaikhu.

la kemudian menegaskan, pentingnya membangun persatuan umat untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya Islamophobia.

"Isu Islamophobia serta tuduhan keji kepada ulama dan tokoh Islam juga turut memprihantinkan, untuk itu

persatuan umat harus kita bangun dengan menyadarkan masyarakat tentang bahaya Islamophobia yang merebak di kalangan masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Syaikhu memberikan apresiasi kepada Masjid Jogokariyan yang telah menjadi role model pengelolaan masjid di Indonesia, ia juga menambahkan pentingnya dakwah yang disertai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sehingga memberikan sentuhan di hati masyarakat.

"Masjid Jogokariyan ini sudah menjadi "role model" umat Islam di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri, karena mesjid ini di kelola secara profesional, terus melakukan inovasi dan tetap menghargai dan mengangkat isu kearifan lokal" kata dia.

"Dakwah dengan sentuhan nilai-nilai budaya lokal sangat penting karena dakwah itu memerlukan sentuhan psikologis," pungkas Syaikhu.

DPTP

Presiden PKS: Pajak Sembako Kebijakan yang Tidak Pancasila dan Menyengsarakan Rakyat!

"Ini kebijakan yang tidak Pancasila karena menciderai rasa keadilan! Dalam kondisi Pandemi seperti ini dapat semakin menyengsarakan rakyat. Ini keadilannya dimana jika benar bahwa sembako akan dipajaki?"

H. Ahmad Syaikhu

Presiden PKS

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai bahwa wacana perluasan pajak (PPN) kepada bahan pokok atau sembako adalah kebijakan yang tidak Pancasila dan menyengsarakan rakyat.

"Ini kebijakan yang tidak Pancasila karena menciderai rasa keadilan! Dalam kondisi Pandemi seperti ini dapat semakin menyengsarakan rakyat," tegas Syaikhu di Semarang, Jawa Tengah, (11/6/2021).

Syaikhu memandang arah kebijakan pajak di Indonesia semakin memperbesar ketimpangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin.

"Ini keadilannya dimana jika benar bahwa sembako akan dipajaki? Di saat yang sama, pengemplang pajak diampuni dengan tax amnesty, pajak korporasi diringankan, dan pajak mobil mewah dibebaskan?"

Syaikhu meminta Pemerintah memiliki rasa empatik dengan kondisi yang menghimpit rakyat.

"Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit karena pandemi, pajak sembako akan semakin mencekik ekonomi dan daya beli masyarakat bawah," kata Syaikhu lagi.

Seharusnya dalam situasi resesi



seperti saat ini, insentif pajak untuk masyarakat menengah bawah diprioritaskan, "Kami di PKS mengusulkan agar pajak penghasilan masyarakat berpendapatan kurang dari 8 juta dihapuskan. Dan pajak sepeda motor ber cc kecil juga ditiadakan. Ini akan sangat

membantu kelompok masyarakat bawah!"

Syaikhu juga mengingatkan kepada Pemerintah agar mengkaji secara komprehensif dampak dan risiko kebijakan pajak sembako sebelum diwacanakan ke publik dan

diajukan ke DPR RI.

"Harus dikaji betul dampak dari kebijakan tersebut sebelum dilemparkan ke publik dan DPR RI. Karena ini akan sangat mempengaruhi kredibilitas dan trust publik ke pada pemerintah," tutupnya.

**PKS**Bersama Melayani
Rakyat**DPTP**

Kunjungan Kerja ke Dapil, Syaikhul Sambangi Ponpes Miftahul Jannah Karawang

“Pak Kiai, saya datang dalam rangka kunjungan kerja untuk melihat langsung kondisi ponpes dan santri selama pandemi dan mendengar aspirasi. insya Allah, aspirasi Pak Kiai akan saya perjuangkan. Tetap disiplin prokes sebab wabah Covid-19 belum berakhir bahkan ada kecenderungan meningkat lagi,”

H. Ahmad Syaikhul

Presiden PKS

Bidang Badan

Angkat Tema Pemberantasan Korupsi Mati Berdiri, PKS Talks Bahas Alih Status Pegawai KPK



PKS TALKS
Pemberantasan Korupsi Mati Berdiri

Moderator:
Nabil Ahmad Fauzi
(Ketua Departemen Politik DPP PKS)

Pembicara:

- Adnan Topan Husodo (Koordinator ICW)
- Ubedilah Badrun (Pengamat Politik UNJ)
- Muhammad Isnur (Ketua Advokat YLBHI)
- Mustofa Farouq (Presiden Garuda Keadilan)
- Giri Supradiono (Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK)

Jakarta-- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar diskusi publik PKS TALKS membahas polemik alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara, pada Jumat (4/6/2021). Diskusi tersebut

mengangkat tema Pemberantasan Korupsi Mati Berdiri dengan melibatkan para akademisi dan civil society.

Dalam diskusi ini ada 4 pembicara yang hadir, diantaranya Koordinator ICW

Adnan Topan Husodo, Pengamat Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, Ketua Bidang Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur dan Presiden Garuda Keadilan Mustofa

Farouq.

Acara diskusi tersebut berlangsung secara virtual dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube PKS TV, Instagram dan Facebook PKS.

Diskusi ini dipandu langsung oleh Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi yang bertindak sebagai moderator.

Nabil Ahmad Fauzi mengatakan PKS TALKS merupakan acara diskusi yang dilaksanakan untuk mendengar dan menampung aspirasi dari publik dan Civil Society terhadap isu dan problematika di masyarakat.

"Ini adalah diskusi yang dilaksanakan untuk mendengar dan menampung aspirasi dari publik maupun stakeholder terkait tentang isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan", Ungkapnya.

la mengungkapkan PKS TALKS ini merupakan upaya PKS sebagai sebuah partai politik

untuk membangun komunikasi dengan Civil Society, stakeholders dan menampung aspirasi dari publik .

"PKS TALK ini menjadi bagian dari ikhtiar kami membangun komunikasi dengan publik, stakeholder dan menampung aspirasi dari publik", ungkap Nabil.

la berharap melalui diskusi ini publik juga dapat memberikan masukan kepada PKS dalam perjuangan politik baik di parlemen maupun pejabat-pejabat daerah PKS.

"Bagaimana menjahit ini menjadi satu masukan bagi kami mengambil langkah-langkah perjuangan politik baik di Parlemen maupun kepala-kepala daerah yang kami miliki, Pungkasnya.

PKS TALK kali ini merupakan edisi perdana dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai wadah PKS mendengar aspirasi dan berkomunikasi dengan publik.

Bidang Badan

Ketua Garuda Keadilan: Generasi Muda Sedih Para Senior Mempertontonkan Pelemahan KPK

"Yang saya sayangkan adalah anak muda menonton langsung dan mencontoh bagaimana bangsa ini mengelola isu korupsi,"

Mustofa Farouq

Presiden Garuda Keadilan



Jakarta – Presiden Garuda Keadilan Mustofa Farouq mengungkapkan kekecewaannya akan upaya-upaya pelemahan KPK

oleh orang-orang yang lebih senior darinya.

"Bagaimana kita generasi muda ini dipertontonkan oleh

generasi-generasi yang lebih senior dalam menangani korupsi dalam pelemahan KPK ini," ujar Farouq dalam diskusi PKS Talks, Jumat (04/06/2021).

Sebagai representasi generasi milenial, dia pun menyayangkan anak muda mendapatkan contoh yang tidak baik tentang cara-cara memberantas korupsi di negeri ini.

"Yang saya sayangkan adalah anak muda menonton langsung dan mencontoh bagaimana bangsa ini mengelola isu korupsi," sambungnya.

Farouq menilai pemerintah sudah tidak malu-malu lagi melakukan pelemahan terhadap KPK secara terang-benderang.

"Ini udah jadi hal yang gak tabu lagi, pelemahan yang sudah terang-benderang dihadapan masyarakat umum," ungkap Farouq.

Ia pun mempertanyakan masa depan KPK setelah serangkaian upaya pelemahan yang sudah terjadi.

"Dan keseriusan ini kita pertanyakan. Dengan adanya TWK ini, dengan adanya pelemahan ini, mau dibawah kemana KPK?" tanya Farouq.

Selain itu, ia juga tidak setuju

dengan mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan dalam proses alih status KPK. Menurutnya tidak boleh ada tafsir tunggal terhadap Pancasila.

"Saya selalu tidak pernah sepakat dengan adanya Pancasila tafsir tunggal," kata Farouq.

Ia menilai tafsir tunggal terhadap Pancasila akan menjadi alat untuk menyerang lawan politik yang memiliki sikap dan pandangan yang berbeda.

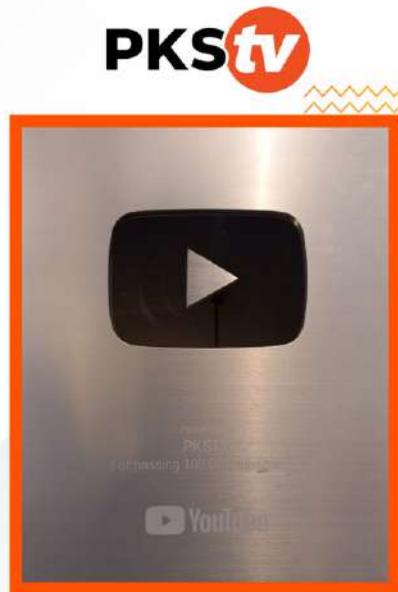
"Ketika Pancasila dijadikan tafsir tunggal akan selalu arahnya penyalahgunaan, menjustifikasi nilai-nilai politik seseorang yang berbeda dengan Pancasila," ujar Farouq.

Farouq menganggap TWK tidak tepat digunakan sebagai indikator penilaian dalam proses alih status pegawai KPK karena tidak relevan.

"Ketika hal-hal yang tidak relevan sama seseorang pribadi dijadikan sebuah nilai bersama ini akan jadi repot," pungkasnya.

Bidan Badan

Promosi Konten Atraktif dan Kreatif, PKS TV Raih Silver Play Button



SILVER PLAY BUTTON

JAKARTA -- Ketua DPP PKS Bidang Humas Mabruki Mei Akbari bersyukur atas diterimanya Silver Play Button buat akun PKS TV oleh Youtube.

Lewat raihan ini, Mabruki

menegaskan jika konten kreatif bisa mendapat perhatian publik dan hal ini kerja keras semua anggota Humas PKS di seluruh Indonesia.

"Terima kasih kepada seluruh anggota dan subscribers PKS TV.

Insya Allah Humas PKS akan meningkatkan konten PKS TV menjadi lebih menarik dan mencerahkan," kata Mabruki.

Mabruki juga menyentil pihak-pihak yang selalu melakukan fitnah di media

sosial kepada PKS dengan mengatakan PKS partai hoaks, PKS anti NKRI, PKS radikal dan lainnya.

"Saya katakan terima kasih. Ini menandakan PKS makin diperhatikan dan diperhitungkan. Kami mengingatkan anggota PKS untuk tidak terpancing dengan provokasi fitnah seperti itu. Santuy aja. Kita jawab fitnah itu dengan kerja keras melayani rakyat. Dokumentasikan kegiatan di lapangan. Tampilkan dengan atraktif dan upload di semua kanal media sosial PKS," sebut dia.

Mabruki mengajak agar warganet tidak memberi tempat bagi para produser konten hoaks yang terus merongrong persatuan bangsa.

"Mari kita selamatkan negeri ini dengan memproduksi berita dan fakta yang benar. Jangan kasih tempat produser berita hoaks yang didukung dana besar menutupi kebohongan dan kelakuan mereka yang korup," tutur dia.

Selain itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhul Mubtadi memberikan apresiasi atas anugerah Silver

Play Button dari Youtube kepada PKS TV, Syaikhul Mubtadi mengatakan PKS TV menjadi satu-satunya TV partai yang memperoleh penghargaan tersebut.

"Kabar gembira saya dapatkan dari Humas DPP PKS. Kanal YouTube PKS TV mendapatkan Silver Play Button," ujar Syaikhul Mubtadi dalam keterangan tertulisnya.

"Ini adalah penghargaan dari YouTube kepada PKS TV yang telah mencapai 100.000 pelanggan (Subscribers). Saat ini, PKS TV menjadi satu-satunya TV partai yang mendapatkan penghargaan ini," lanjutnya.

Ahmad Syaikhul Mubtadi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PKS dan masyarakat yang telah berpartisipasi dan menjadi pelanggan PKS TV.

Lebih lanjut, ia mengatakan keluarga besar PKS bangga dengan pencapaian ini, Ahmad Syaikhul Mubtadi juga memberikan selamat kepada Humas DPP PKS, dan mendorong agar terus berkarya menunjukkan wajah Partai Islam Rahmatan Lil alamin.

**PKS**Bersama Melayani
Rakyat**Bidang Badan**

PKS Beri Kesempatan Berpolitik Seluas-luasnya untuk Anak Muda

“Demografi kita ke depan akan diisi oleh anak-anak muda, PKS tidak hanya menjadikan anak muda sebagai objek atau pemilih tapi sebagai subjek atau pelaku yang berperan dalam politik. Dalam jangka lima tahun ke depan generasi muda atau milenial akan mendominasi berbagai sektor, maka PKS harus siap menyambut bonus demografi milenial dengan menjadi partainya anak muda,”

Yanuar Arif Wibowo, S.H.

Wakil Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan

Bidang Badan

PKS Dorong Masyarakat Sehat dan Bugar Lewat PVR

Jakarta -- Ketua Departemen Olahraga dan Kebugaran DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Defrizal Siregar menyampaikan kegiatan PKS Virtual Race (PVR) dilaksanakan untuk mendorong masyarakat sehat dan bugar di tengah pandemi Covid-19.

"Kami berharap tiap bulan ada kegiatan ini di seluruh penjuru Indonesia, sehingga masyarakat kita terdorong untuk hidup sehat dan bugar. Kita yakin ketika masyarakat sehat dan bugar maka produktivitasnya akan semakin tinggi. Di tengah pandemi ini maka defensif dirinya juga akan semakin kokoh," ungkap Defrizal dalam acara puncak PVR, Ahad (06/06/2021).

Defrizal mengatakan penyelenggaraan PVR ini adalah bentuk kepedulian PKS terhadap masyarakat, sebab menjaga antibodi tetap kuat

juga hal yang penting selain melakukan protokol kesehatan.

"Di era pandemi ini, menjaga kebugaran, meningkatkan imunitas, itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi bukan hanya dengan masker, menjaga jarak, cuci tangan. Membentuk antibodi secara personal dan bagus juga merupakan hal yang penting," jelas Defrizal.

Defrizal melaporkan antusiasme masyarakat untuk mengikuti acara PVR tinggi, walaupun di tengah keterbatasan kondisi pandemi Covid-19.

"Dengan keterbatasan hari ini kita tidak bisa offline maka kita laksanakan secara virtual, dengan target 123 km gowes dan 23 km untuk lari. Alhamdulillah peserta sangat antusias, ratusan sampai ribuan orang ikut di aktivitas ini.



LIK LIKE SHARE & SUBSCRIBE YOUTUBE PKSTV.

www.pks.id
[Partai Keadilan Sejahtera](https://www.facebook.com/PartaiKeadilanSejahtera)
[@PKSejahtera](https://twitter.com/PKSejahtera)

Minggu lalu juga melaksanakan puncak PVR alhamdulillah diikuti 19.000 peserta di seluruh Indonesia," papar Defrizal.

Defrizal berharap pelaksanaan

PVR ini dapat memberikan pengaruh positif untuk masyarakat.

"Semoga kegiatan ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat

Indonesia, sesuai dengan motto dan juga slogan PKS yaitu melayani masyarakat. Dan ini bentuk pelayanan kami, agar masyarakat kita sehat dan bugar," harap Defrizal.

Bidan Badan

Jadikan PVR Acara Tahunan, Yoyok: PKS Tak Hanya Bicara Masalah Politik



"Kalau kita baca di platform PKS, itu ada satu visi tentang PKS. Yakni membantu pemerintah untuk mensosialisasikan dan memasyarakatkan olahraga Indonesia dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup,"

Yoyok Switohandoyo

Ketua Bidang Kepanduan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Jakarta -- Ketua Bidang Kepanduan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yoyok Switohandoyo menyetujui rencana penyelenggaraan agenda PKS Virtual Race (PVR) yang akan dilanjutkan sebagai acara tahunan.

"Saya sangat sepekat dengan keinginan besar dari Departemen Olahraga dan Kebugaran, bahwa PVR akan kita lanjutkan. Ini juga menjalankan arahan dari Presiden PKS, bahwa PVR akan kita selenggarakan di tahun-tahun ke depan sebagai kegiatan yang menyehatkan dan membugarkan

masyarakat," ujar Yoyok dalam sambutannya di acara puncak PVR, Ahad (06/06/2021).

Yoyok menyampaikan penyelenggaraan acara tersebut sejalan dengan visi yang dibawa oleh PKS.

"Kalau kita baca di platform PKS, itu ada satu visi tentang PKS. Yakni membantu pemerintah untuk mensosialisasikan dan memasyarakatkan olahraga Indonesia dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup," tutur Yoyok.

PVR yang diselenggarakan oleh

Departemen Olahraga dan Kebugaran DPP PKS ini menjadi suatu bentuk nyata bahwa PKS sebagai partai politik tak hanya menjadi institusi politik yang membicarakan masalah politik semata tapi juga berbicara tentang kebutuhan dasar manusia.

"PKS yang menjadi bagian dari institusi politik ini, tidak hanya bicara masalah politik tapi juga membicarakan masalah paling dasar tentang kebutuhan dasar manusia, yakni tentang kebugaran dan kesehatan," jelas Yoyok.

Bidang Badan

PKS : PPN merugikan Petani dan Peternak

Sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/2020 menyebutkan setidaknya ada 14 kelompok barang yang tidak dikenai tarif PPN, di antaranya adalah beras dan gabah, jagung, sagu, garam konsumsi, gula konsumsi, susu, kedelai, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan.

"Petani dan peternak saat ini menghadapi tekanan global dengan impor pangan yang merugikan, kekalahan telak di WTO dalam berbagai kebijakan perdagangan serta lemahnya perlindungan harga produk petani menjadikan PPN ini pukulan mematikan bagi petani. Kalau PPN dinaikan menjadi 12% itu artinya rakyat dibebani kenaikan pajak di saat daya beli menurun dan sulitnya mencari lapangan kerja, ekonomi akan semakin susah. Kondisi petani dan peternak sedang susah, masak iya akan dikenakan pajak?"

Riyono, S.Kel

Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan DPP PKS

Bidang Badan

PKS: Pelemahan KPK Berdampak Buruk Terhadap Investasi



Pelumpuhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa berdampak buruk bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Hal demikian disampaikan Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Investasi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni.

“Persoalan pembebasan 75 pegawai KPK dengan dasar yang tidak jelas harus disadari bukan sekadar persoalan kepegawaian, tetapi lebih dari itu persoalan yang dapat berakibat buruk bagi

perekonomian Indonesia,” kata Farouk Alwyni dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/6/2021).

Yang paling terdampak, kata dia, adalah sisi investasi. Bagaimanapun kisruh KPK secara langsung akan membentuk cara pandang dunia bisnis internasional. Investor akan melihat Indonesia sebagai tempat yang tidak atraktif untuk menanam modal dan melakukan bisnis.

Dalam penjelasan alumnus New York University ini, negara dengan iklim koruptif akan diasosiasikan sebagai high cost

economy oleh para investor. Hal itu dengan terang menggambarkan bahwa efisiensi investasi di negara tersebut akan tidak optimal.

“Investor tentu ikut menilai peta korupsi di suatu negara. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar ongkos investasi. Dan negara seperti ini tidak sesuai dengan habitus pebisnis yang mementingkan efisiensi biaya,” katanya.

“IPK yang jeblok ini menyebabkan apa yang disebut sebagai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia kalah dari negara lain terutama di wilayah ASEAN. ICOR Indonesia pada tahun 2020 berada di angka 6,8 persen, kalah dari Vietnam yang ada di angka 3,7 persen; Filipina 4,1 persen; dan Malaysia 5,4 persen.” Kata mantan Direktur Bank Muamalat ini.

Lebih lanjut, Farouk menjelaskan bahwa ICOR juga sangat dipengaruhi soal kemudahan dalam berbisnis.

Namun praktik yang terjadi selama ini justru sebaliknya. Banyak investor merasa ada problem struktural yang membuat mereka mau tidak mau harus berhadapan dengan birokrat korup pemburu rente.

“Dalam perspektif investor asing, mereka tidak banyak pilihan atas sektor riil investasi di Indonesia yang suka tidak suka membuatnya harus berhadapan dengan praktik kartel, monopoli, dan lobi-lobi bisnis yang ongkosnya tidak sedikit,” kata Farouk Alwyni.

Secara ringkas, Partai Keadilan Sejahtera menilai kisruh KPK perlu diwaspadai sebagai sinyalemen yang memperburuk berbagai lapis masalah, mula-mula adalah kepastian hukum. Buruknya kepastian hukum akan membuka celah korupsi, di mana hal itu pada gilirannya membuat investor asing menganggap Indonesia sebagai pasar yang harus dihindari.

“Pekerjaan beratnya adalah

bukan hanya investor asing yang perlu diyakinkan. Investor domestik pun perlu ditahan agar tidak menanamkan modalnya ke luar negeri,” katanya.

PKS menyarankan Presiden Jokowi dapat mengambil tindakan yang menentukan untuk mencegah para bawahannya melakukan pelumpuhan KPK seenaknya sendiri. Farouk mengatakan, faktor kepemimpinan mestinya dapat lebih ditegaskan dalam isu semacam ini.

“PKS menganggap pemecatan 75 pegawai KPK sejatinya adalah bagian dari persoalan pembangunan Indonesia, yakni, apakah kita akan tetap jadi negara dunia ketiga dengan institusi koruptif yang menciptakan high cost economy, atau ingin keluar dari keterbelakangan dan masuk ke jajaran negara maju dengan penerapan tata kelola yang baik. Presiden dalam hal ini harus mampu menunjukkan kepemimpinannya,” tukas Farouk Alwyni.

Badan Bidang

Sekolah Digital PKS Papua, Bawa Spirit Transformasi Digital

JAYAPURA - Ditengah curah hujan yang tinggi (11/6), Bidang Humas PKS Papua didampingi oleh Ketua PKS DPW Papua (Suherman) resmi membuka kegiatan training kehumasan dan Sekolah Digital (SD) Papua yang diadakan di Hotel Sahid Entrop, Jayapura.

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 40 peserta dari perwakilan DPD Kota dan Kabupaten se Provinsi Papua. Tidak hanya itu pemateri yang diundang pada peluncuran Sekolah Digital langsung dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Bidang Humas. Mereka diantaranya adalah PKS Foto, PKS Art, PKS TV, dan Relawan Literasi.

Dalam kesempatan yang langka ini ada beberapa pesan yang diamanahkan kepada seluruh DPD kota dan kabupaten se Papua oleh ketua DPW PKS Papua.

Yang pertama adalah memaksimalkan sarana social media dalam rangka

transformasi digital untuk mendapatkan simpati masyarakat.

“Mendapatkan simpati masyarakat zaman dulu dan sekarang sudah berbeda, jika memaksakan cara kolonial yang sama seperti yang dulu, bisa jadi PKS tidak akan mendapatkan dukungan yang banyak,” ujarnya saat menyampaikan sambutan pada sore hari itu.

Ketua DPW PKS Papua juga mengimbuhkan masa-masa ini adalah saat nya anak muda mengambil peran dengan kreatifitasnya untuk menarik suara masyarakat banyak, khususnya di wilayah Papua.

Disamping itu, keprihatinan karena tidak adanya jaringan internet selama 39 Hari membuat kerja Humas tidak maksimal serta terhambat dalam merilis kabar dan konten kreatif. Hal ini tentu disadari oleh Suherman bahwa Humas, yang didominasi oleh generasi milenial, tanpa internet



bagaikan Sayur Bayam tanpa Garam.

“Saya akui, yang paling menderita saat tidak adanya jaringan selama 39 Hari adalah Bidang Humas. Buat Humas, yang isinya anak milenial semua, tidak ada jaringan internet itu sama seperti makan sayur bayam tanpa garam”

pernyataan ini disambut dengan tawa dan tepuk tangan para undangan pada hari itu.

Terakhir, menjelang ditabuhnya tifa sebagai tanda pembukaan kegiatan ini, Ketua DPW PKS Papua menyemangati para peserta untuk bersuka cinta dalam mengikuti pelatihan ini serta menyerap

sebanyak-banyaknya ilmu yang dibagikan oleh pihak DPP PKS. Harapannya, setelah mengikuti pelatihan ini, seluruh DPD Kota dan Kabupaten se Papua mampu mentransformasikan ilmu yang diperoleh dalam sebuah karya kebaikan sehingga dapat menjadi inspirasi untuk masyarakat Papua.

**PKS**

Bersama Melayani Rakyat

**Bidang Badan**

BPW Sumbagut Gelar Acara Peningkatan Kapasitas

“Pengurus dan Anggota PKS harus fokus dengan dua tujuan ini, yaitu penambahan anggota dan suara. Saya yakin dan percaya, Pengurus PKS se-Kepulauan Riau dapat meningkatkan jumlah anggota dan suara di tahun 2024 nanti nya, Insya Allah,”

Hendry Munief

Ketua DPP PKS BPW Sumbagut

Bidan Badan

Penyesuaian Tarif Listrik di Saat Ekonomi Masih Lesu Dinilai Tidak Etis



Rencana pemerintah menerapkan penyesuaian tarif

listrik bagi pelanggan non subsidi dinilai tidak etis. Sebab,

"Kebijakan penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi berpotensi kian memperlambat proses pemulihan ekonomi nasional. Daya beli masyarakat juga makin menurun karena akan menambah inflasi. Terlebih di saat tekanan terhadap APBN yang kian berat. Etiskah langkah ini?"

Mardani Ali Sera

Ketua Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup DPP PKS

dana kompensasi tarif yang selama ini diberikan ketika kondisi ekonomi nasional belum terdampak pandemi akan dihilangkan.

"Terlebih di saat tekanan terhadap APBN yang kian berat. Etiskah langkah ini?" tanya anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera lewat akun Twitter pribadinya, Kamis (17/6).

Ketua DPP PKS ini mengurai bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2021 masih mengalami kontraksi

minus (-) 0,74 persen.

Ekonomi belum mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi empat kali berturut-turut sejak kuartal II 2020.

"Ini menunjukkan, daya beli masyarakat masih rendah dan kondisi resesi ekonomi belum berakhir karena pandemi," terangnya.

Dengan kata lain, seluruh lapisan masyarakat pelanggan rumah tangga atau industri terdampak secara langsung. Mereka memerlukan kebijakan stimulus yang dapat

membantu mempertahankan daya beli.

Sementara rencana penyesuaian tarif seakan memperlihatkan pemerintah tidak sadar bahwa listrik merupakan kebutuhan mendasar dan komoditas strategis bagi masyarakat.

"Kebijakan penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi berpotensi kian memperlambat proses pemulihan ekonomi nasional. Daya beli masyarakat juga makin menurun karena akan menambah inflasi," tutupnya.

Bidang Badan

PKS : 6 Bulan 83 Nelayan Hilang, KKP Harus Fokus ke Perlindungan Nelayan

"Dari 42 insiden tersebut, kami mencatat 142 orang korban dengan rincian 83 hilang, 14 meninggal dan 42 selamat. Rata-rata dalam satu bulan 7 kejadian dialami nelayan dan pasti memakan korban. 42 kejadian kecelakaan kerja dilaut harus menjadi alarm bagi KKP, jangan hanya kejar PNBP tapi nelayan kecil banyak yang terabaikan hak - haknya,"

Riyono, S.Kel

Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS



Semarang -- Data Lembaga Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mencatat bahwa dalam kurun waktu enam bulan terakhir, yaitu tepatnya dari periode Desember 2020 hingga Juni 2021, tercatat ada sebanyak 83 nelayan yang hilang dilaut akibat musibah dan kecelakaan laut.

Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono menilai bahwa kejadian dalam jangka waktu Desember 2020-Juni 2021, ada sebanyak 42 kali insiden kecelakaan yang dialami oleh perahu nelayan atau kapal ikan di perairan Indonesia adalah kejadian amat serius yang harus mendapat respon cepat dari pemerintah.

"Dari 42 insiden tersebut, kami mencatat 142 orang korban dengan rincian 83 hilang, 14 meninggal dan 42 selamat. Rata-rata dalam satu bulan 7 kejadian dialami nelayan dan pasti memakan korban," tambah Riyono mengutip pernyataan Koordinator DFW Abdi.

"Kecelakaan yang terjadi pada nelayan kecil dan tradisional dengan kapal di bawah 10 GT. Ini semakin menambah duka

ditengah kondisi pandemi yang masih belum berakhir," kata Riyono.

PKS mendorong KKP agar segera mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten agar membuat perda perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang di dalamnya bisa untuk membantu perlindungan kepada nelayan kecil.

"Program asuransi dan jaminan sosial bagi nelayan kecil mutlak di lakukan oleh pemda sebagai wujud hadirnya negara disaat mereka bekerja ditengah di laut," tambah Riyono.

Selain perda perlindungan nelayan hendaknya KKP juga harus mulai menata dan memberikan perlindungan dalam aspek keamanan kerja bagi nelayan. Banyak kasus kecelakaan kerja hanya berakhir dengan santunan sosial yang bersifat charity tanpa tindak lanjut program jangka panjang.

"42 kejadian kecelakaan kerja dilaut harus menjadi alarm bagi KKP, jangan hanya kejar PNBP tapi nelayan kecil banyak yang terabaikan hak - haknya," tutup Riyono.

Nantikan terus E-Magazine KABARPKS

Kabarkan Kiprah PKS untuk Indonesia



E-MAGAZINE

KABARPKS

Kabarkan Kiprah PKS untuk Indonesia

KABARPKS | Diterbitkan oleh Bidang Humas dan PPID DPP PKS

Penanggung Jawab: Ahmad Mabruki (Ketua DPP PKS Bidang Humas)

Pemimpin Redaksi: Hafidz Muftisany | Redaktur Pelaksana: Erwyn Kurniawan

Redaksi: Arya Jagad Pamungkas, Hanifah Irham | Fotografer: Muhammad Hilal, Donny, Juliyanto, Daru, Alris (PKS Foto)

Desain & Layout: Azam Muhammad (PKS Art)

Alamat Redaksi: MD Building | Jalan TB.Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia.

Phone +62 21 7884 2116, Fax +62 21 7884 6456, E-Mail humas@pks.id



Download e-Newsletter
KABARPKS di pks.id